

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki warisan budaya yang kaya dan kompleks, begitu juga dengan nilai dan norma yang tertanam di dalamnya. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal penting yang menjadi tolak ukur pemertahanan dalam nilai, kebudayaan, hingga norma di Tiongkok. Salah satunya ialah pengaruh nilai Konfusianisme yang muncul pada abad ke 5 Masehi menekankan terhadap etika dan moral yang mengatur manusia sesuai dengan posisi masing-masing (Asruchin, 2019). Begitu juga dengan konservasi budaya Tiongkok, seperti dalam penggunaan simbol bahasa hingga pakaian tradisional.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pembatas antar negara semakin tidak terlihat dan sangat mudah bagi negara lain untuk mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks budaya, nilai, dan norma dalam negara, hal ini bisa saja menjadi ancaman dikarenakan kelunturan atau dapat terlupakannya tiga hal tersebut. Ancaman yang dapat dialami oleh Tiongkok dalam hal ini antara lain lunturnya norma social hingga mentalitas masyarakat Tiongkok, efek terhadap budaya barat, hingga pengaruh dari perbedaan definisi konsep kebebasan dengan Barat yang demokratik dengan Tiongkok yang lebih sosial-komunis (Cypris, 2017). Tidak hanya itu, ketidakadaan batas antar negara juga dapat mempengaruhi

perekonomian negara jika tidak diiringi dengan kemandirian negara untuk mengembangkan perekonomiannya tersendiri.

Dalam hal ini, pengaruh negara barat seperti Amerika Serikat sebagai negara superpower dapat menjadi ancaman terhadap kebudayaan, nilai, hingga norma negara-negara lainnya seperti Tiongkok. Ketegangan antara kedua negara Tiongkok dan Amerika Serikat sudah terjadi saat pasca perang dingin, dimana kedua negara terus berlomba-lomba untuk menjadi negara berkuasa di dunia internasional. Dalam bidang teknologi, keduanya saling berperang dan memblokir satu sama lainnya. Dimana Amerika Serikat memblokir produk Huawei dan ZTE begitu juga dengan Tiongkok yang memblokir Google serta Sosial media lainnya milik Amerika Serikat (Bestari, 2023).

Salah satu hal yang dapat kita lihat lagi ialah respons pemimpin Tiongkok dalam ancaman barat terutama Amerika Serikat dalam kebudayaan, nilai (termasuk ideologi), hingga perekonomian Tiongkok. Di tahun 2012, presiden Hu Jintao mengatakan bahwa Tiongkok haruslah memperkuat produksi kultural untuk mengurangi pengaruh barat dalam kebudayaan dan ideologi (Wong, 2012). Begitu juga dengan presiden Tiongkok yang menjabat pada masa kini, kampanye Xi Jinping merefleksikan preferensi Tiongkok untuk menggunakan standar Tiongkok sebagai alternatif dari nilai dan institusi barat. Namun, semua tanggapan pemimpin tersebut tidak sepenuhnya bisa dibilang sebagai bentuk *anti-west*, dikarenakan Tiongkok sendiri masih membuka jalan untuk kerjasama dengan barat dalam

beberapa bidang lainnya. Tanggapan tersebut merupakan salah satu usaha untuk menjaga kebudayaan Tiongkok (Brady, McGregor, & Daly, 2015).

Presiden Xi Jinping juga mengarahkan kepada universitas di Tiongkok untuk menanamkan dan mengajarkan orientasi politik yang benar kepada mahasiswa/i Tiongkok. Xi menekankan bahwa universitas harus mengarahkan agar guru-guru serta mahasiswa/i di dalamnya menjadi percaya dan berpegang teguh pada nilai-nilai komunis-sosialis. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok merasa takut dan mulai kekurangan kendali terhadap loyalitas ideologinya pada masyarakat muda. Salah satu hal yang menjauhkan pemikiran ideologis para masyarakat muda di Tiongkok ialah adanya kultur pop dari budaya asing serta infiltrasi terhadap nilai barat. Menurut salah satu ahli yakni Stanley Rosen, seorang ahli politik dari yang berasal dari Universitas California Selatan, mengatakan bahwa terdapat ancaman yang nyata akan hal ini bagi pemahaman ideologi Tiongkok kedepannya pada masyarakat muda (Fish, 2017).

Di sisi teknologi informasi, perkiraan total pengguna internet di negara Tiongkok berdasarkan Pusat Informasi Jaringan Internet Tiongkok atau *The Chinese Internet Network Information Center* (CNNIC) pada Juni 2022 telah mencapai 1,05 Miliar pengguna. Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia (Jamil, 2022). Cakupan Internet Tiongkok dari seluruh penduduknya mencapai 83.1% pada penduduk yang tinggal di area perkotaan, sedangkan di area pedesaan cakupan internet telah mencapai 62% (Thomala, demografi dan penggunaan, 2023).

Masyarakat yang mengakses sosial media melalui internet di China pada tahun 2021 mencapai 938 Juta pengguna (Thomala, 2023). Data-data tersebut telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam penggunaan sosial media di China dari tahun ke tahunnya.

Dari asal kata-nya, *Great Firewall* adalah inspirasi dari *Great Wall of Tiongkok* atau Tembok Besar Tiongkok dan *firewall* dalam media internet. *The Great Firewall* mengacu pada upaya Tiongkok dalam menciptakan infrastruktur digital untuk menghentikan materi yang tidak dapat diterima negara melalui Internet. Selain itu, *firewall* adalah sistem keamanan yang dibuat untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas jaringan yang menuju sistem informasi dalam bisnis. Serupa dengan ide *firewall* tetapi dengan cakupan yang jauh lebih besar, *The Great Firewall of Tiongkok* adalah sistem filter nasional yang digunakan di Tiongkok untuk *memblokir* situs web asing yang berisi informasi apa pun yang dianggap tidak diinginkan oleh pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, situs web asing, seperti Facebook, Google, X, dan YouTube, telah diblokir oleh *Great Firewall* (Lee, 2018).

Pemerintah Tiongkok sekarang secara aktif memantau arus informasi melalui salah satu pilar utama sistem sensor dan pengawasan Internet Tiongkok yakni *Great Firewall*. *Great Firewall* secara luas diyakini sebagai komponen dari proyek “*Golden Shield*” resmi milik Tiongkok yang juga mencakup antara lain, pembentukan jaringan pengawasan digital yang luas melalui kontrol penyedia layanan Internet (ISP), webcam, dan sensor perangkat lunak pada komputer pribadi

yang dapat diakses di kafe internet (Lee, 2018). Proyek terkait kontrol penggunaan internet itu sendiri sudah ada semenjak tahun 1997, pada saat itu kementerian keamanan publik China mengeluarkan regulasi terkait kontrol internet kepada masyarakat. Hal ini ditulis dalam pasal 4-6, didalamnya dijelaskan bahwa individu tidak diperbolehkan untuk menggunakan internet sebagai sarana yang membahayakan keamanan nasional, membahayakan kepentingan negara dan masyarakat, dan membuka rahasia negara (Morrison & Black, 2022). Perkembangan proyek ini berhasil menjadi lebih masif dan intensif seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kini Tiongkok juga ikut memfilter beberapa sosial media luar seperti *Google*.

Keberadaan *Great Firewall* itu sendiri dapat kita katakan sebagai salah satu Langkah Tiongkok dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya dari pengaruh luar. Tiongkok sendiri memiliki 6 prinsip dalam kepentingan nasionalnya, yakni *state sovereignty, national security, territorial integrity, national reunification, China's Political system by the constitution and social stability, and basic safeguard for sustainable economic and social development* (Zhaokui, 2014). Melihat adanya keamanan nasional sebagai salah satu bentuk kepentingan nasional Tiongkok dalam menjalankan negaranya, undang-undang keamanan nasional Tiongkok menjelaskan pada pasal 3 bahwa dalam menjalankan negaranya, Tiongkok akan menjadikan rakyat sebagai tujuan keamanan, keamanan politik dan ekonomi sebagai fondasi serta dasar, hingga keamanan budaya dan sosial sebagai jaminan, semua keamanan tersebut akan dicapai melalui ciri khas

Tiongkok (China Services Info, 2018). Melihat konstitusi-konstitusi sebelumnya, pemerintah Tiongkok kemudian menyesuaikan konstitusi *cyber* dengan konstitusi keamanan nasional Tiongkok. Dimana pada pasal 1 dijelaskan bahwa, hukum ini dibentuk untuk memastikan keamanan *cyber*, kedaulatan *cyber*, dan keamanan nasional Tiongkok (Digi China, 2018).

Keberadaan *The Great Firewall of Tiongkok* juga memberikan adanya dampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif yang terjadi ialah banyaknya protes yang dilakukan oleh masyarakat Tiongkok dikarenakan hal ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia masyarakat Tiongkok. Keberadaan *Great Firewall* juga seringkali mendapat teguran dari masyarakat Internasional, hal ini mendorong munculnya Gerakan TAN seperti Greatfire.org untuk melawan adanya sensor di Tiongkok serta beberapa *Transnational Advocacy Network* lainnya (Yuniarti, 2021).

Namun, terdapat dampak positif yang tidak kalah signifikan dengan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Salah satunya ialah perkembangan terhadap penggunaan teknologi lokal oleh masyarakat Tiongkok sendiri. Hal ini pun mendorong kemunculan sosial media “klon” yang dibuat oleh Tiongkok seperti *Baidu*, *Weibo*, *Wechat*, dan sebagainya. Keberadaan sosial media tersebut berhasil memberikan keuntungan bagi perusahaan teknologi dan ekonomi Tiongkok, peningkatan penggunaan mencapai 749 juta pengguna pada tahun 2014 dan berhasil memberikan keuntungan sebesar 300 juta yuan atau setara Rp 534 triliun (Yuniarti, 2021). Masyarakat Tiongkok di sisi lainnya juga tidak merasa terbebani

dengan adanya penyensoran yang diberikan oleh pemerintah, survey yang diberikan oleh masyarakat Tiongkok, salah satu survey yang diberikan kepada akademisi yang terhormat di Tiongkok menunjukkan bahwa 85% dari mereka menyetujui pemerintah untuk tetap mengontrol berjalannya serta informasi yang terdapat di Internet (Sydell, 2008).

Seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, Tiongkok tentu saja tidak tinggal diam dan tetap mengikuti perkembangan sosial media dengan melakukan “kloning” pada sosial media milik luar. Salah satunya seperti dengan keberadaan *Google*, walaupun cukup menarik perhatian masyarakat Tiongkok, namun terjadi banyak penyensoran yang diwajibkan bagi *Google* oleh pemerintah Tiongkok terkait beberapa isu politik tertentu. Salah satunya ialah adanya tragedi Tiananmen, dimana jika kita mencarinya melalui *Google*, hasil yang ditampilkan hanyalah gambar alun-alun Tiananmen. Penyensoran tersebut pun mendorong adanya kemunculan *search engine Baidu*. *Search engine* ini didirikan oleh Tiongkok sesuai dengan aturan undang-undang Internet di Tiongkok, Popularitas *Baidu* sendiri terus meningkat dikalangan masyarakat Tiongkok dan berhasil mengontrol 75% penggunaan *search engine* di Tiongkok. Pengguna *Baidu* juga banyak berasal dari masyarakat Jepang hingga Amerika (Frederick, 2022).

Sosial media lainnya seperti *Weibo* dan *Wechat* juga tidak kalah banyak digunakan oleh masyarakat Tiongkok. *Weibo* sendiri merupakan aplikasi klon yang mirip dengan *X*, berjuta-juta rakyat Tiongkok menggunakan *Weibo* sebagai salah satu situs untuk bertukar informasi dan menyuarakan pendapatnya pada isu-isu

sosial tertentu. Berjalannya *Weibo* juga telah disesuaikan dengan keberadaan undang-undang sensor, sehingga pendapat-pendapat masyarakat yang dituliskan di dalamnya pun mengikuti aturan yang telah ada (South China Morning Post, n.d.). Begitu juga dengan *Wechat*, *Wechat* merupakan salah satu sosial media di Tiongkok yang telah menyentuh hingga 1 Milyar pengguna, *Wechat* biasanya digunakan untuk melakukan pengiriman pesan. Namun di luar itu, *Wechat* juga bisa digunakan untuk hal lain seperti melakukan pembayaran hingga pemesanan hotel dan tiket penerbangan (Muhammad, 2019).

Penggunaan sosial media yang terus berkembang di Tiongkok pun mendorong semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2022 silam, peringkat sosial media tertinggi yang digunakan oleh masyarakat Tiongkok ialah *Wechat*. Peringkat tersebut disusul dengan beberapa sosial media lainnya seperti *Douyin*, *QQ*, *Baidu Tieba*, *Xiaohongshu*, *Sina Weibo*, *Kuaishou*, *QZone*, *Meipai*, dan *Douyin Huoshan*. Berdasarkan peringkat tersebut, maka dapat kita lihat bahwa masyarakat Tiongkok memiliki antusiasme dan minat lebih tinggi terhadap sosial media yang dibentuk oleh perusahaan domestik (Thomala, social media & user generated content, 2023).

Kemudian, sosial media sendiri memungkinkan masyarakat untuk mengakses segala bentuk informasi serta mengunggah berbagai pendapat didalamnya. Penggunaan sosial media milik domestik juga turut digunakan oleh warga Tiongkok dikarenakan bahasa yang sesuai. Pada tahun 2022 Tiongkok sendiri mengalami penurunan dalam peringkat kecakapan berbahasa Inggris, Tiongkok

berada pada peringkat 62 dan berada di belakang negara Singapura, Filipina, hingga Malaysia. Sehingga, sosial media domestik lebih disukai oleh masyarakat Tiongkok dibandingkan dengan internasional (Huifeng & Wong, 2023).

Keberadaan *The Great Firewall* itu sendiri merupakan salah satu bentuk tindakan pengamanan bagi negara terhadap pengaruh dunia luar, pengaruh budaya hingga nilai dari luar merupakan sesuatu yang tidak bisa dibendung oleh negara seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi dan globalisasi. Namun, dalam menghadapi kemajuan ini, negara haruslah sigap untuk menjaga agar ciri khasnya tidak hilang dengan begitu saja. Sehingga, Tiongkok mengesahkan adanya kebijakan sensor terhadap sosial media yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan budaya Tiongkok.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Tiongkok mempertahankan kepentingan nasional berupa nilai konfusianisme dan budaya dari pengaruh barat melalui *The Great Firewall*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi negara-negara terhadap urgensi suatu kebijakan *cyber* sebagai pertahanan bagi nilai dan kebudayaan negara.

Tujuan Khusus: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *the great firewall* berdampak pada keamanan nilai dan kebudayaan bagi negara Tiongkok.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis: Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dari perspektif lainnya terhadap dampak keberadaan *The Great Firewall* of Tiongkok, perspektif yang dituliskan dalam penelitian ini kedepannya dapat memberikan pemahaman baru bagi negara-negara internasional serta pembuat kebijakan terhadap kegunaan sensor internet untuk pertahanan dan keamanan segala unsur negara.

Kegunaan Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru bagi para peneliti di bidang yang sama, serta menambah wawasan dan memberikan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti terhadap kebijakan sensor Tiongkok.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Literatur

Muhammad Yusrizal (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, *Google* sebagai salah satu *search engine* di dunia mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan regulasi penyensoran internet milik Tiongkok. Hal ini pun menyebabkan mundurnya *Google* dari Tiongkok dan kemunculan serta perkembangan *search engine* domestik bernama *Baidu*. Keberadaan *Baidu* sendiri berhasil menimbulkan perkembangan bagi perekonomian Tiongkok, selain itu *Baidu* juga lebih disukai masyarakat Tiongkok dikarenakan jasa yang disediakan serta pengaksesan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan *Google*. Di Dalam penelitian ini, dipaparkan perspektif positif adanya

keberadaan sensor internet dalam bidang perekonomian. Namun di dalam penelitian ini, penjelasan mengenai tindakan kejahatan kemanusiaan Tiongkok sebagai salah satu dampak adanya *Great Firewall* tidak sepenuhnya relevan dengan tema penelitian yang menekankan tentang dampak keberadaan *Google* di Tiongkok.

Setelah itu, Rahma Eliya Faida (2015) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai motif Tiongkok yang memberlakukan *Great Firewall* sebagai bentuk sensor pada beberapa informasi yang diunggah pada internet di Tiongkok. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori sekuritisasi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Dimana kemajuan era komunikasi dan informasi ini bisa saja mendorong terjadinya fenomena *cyber crime*. Sehingga, hal tersebut memunculkan kekhawatiran Tiongkok dalam berbagai bidang. Penelitian diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang kemunculan sistem sensor di Tiongkok hingga implementasi dari teori sekuritisasi sebagai bentuk pertahanan yang dilakukan Tiongkok dalam bidang ekonomi, keamanan, hingga pertahanan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian milik Faida ialah, dalam penelitian ini pertahanan difokuskan kepada keamanan nasional yaitu Budaya yang mencakup nilai konfusianisme sebagai pedoman moral di Tiongkok, kemudian juga pertahanan terhadap nilai sosialis-komunis yang diterapkan Tiongkok.

Kemudian, Bin Liang dan Hong Lu (2012) menjelaskan tentang perkembangan internet hingga kejahatan *cyber* di Tiongkok. Dalam penelitian

ini, penulis menjelaskan mengenai sensor internet Tiongkok pada saat awal dibentuk hingga aksi Tiongkok yang bekerja sama dengan para investor bisnis luar untuk meningkatkan perkembangan teknologi. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan tentang demokratisasi dalam penggunaan internet di Tiongkok serta bagaimana masyarakat Tiongkok menanggapi adanya sistem sensor di Tiongkok secara umum. Penelitian ini juga membahas kembali tentang dampak positif *The Great Firewall* dari sisi ekonomi Tiongkok. Penelitian ini telah dibahas secara terstruktur dan dapat memberikan perspektif lain akan penyesuaian yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam menanggulangi tindakan kriminal online seperti judi dan pornografi melalui adanya *The Great Firewall*.

Selanjutnya, Rebecca MacKinnon (2011) memaparkan tentang penyensoran *The Great Firewall* sebagai salah satu bentuk *network authoritarianism*. Penulis dalam penelitian ini menjelaskan tentang tindakan otoritarianis Tiongkok dalam menyensor, membatasi opini, hingga menutupi kebenaran negara melalui *The Great Firewall*. Penulis menjelaskan bahwa masyarakat Tiongkok sulit untuk mengakses media sosial luar seperti X dan beberapa dari mereka tidak menyetujui hal tersebut. Penulis menuliskan mengenai apakah *online activism* di Tiongkok dapat mempengaruhi kebebasan atau demokratisasi di Tiongkok, namun hal ini masih abu-abu kejelasannya dikarenakan penulis menjelaskan bahwa tidak semua bentuk aktivisme di Tiongkok dapat mempengaruhi keberadaan *Great Firewall*. Sehingga, hanya

beberapa aktivisme yang berhasil saja dan dibantu oleh para birokrat lokal liberal yang hendak memberantas sistem konservatif Tiongkok. Terakhir, penulis menekankan bahwa diperlukan adanya transparansi dan pembuatan kebijakan yang akuntabel untuk pemerintah Tiongkok.

Setelah itu, Quynh Dan Nguyen (2016) menuliskan tentang perbandingan dari sensor internet di Tiongkok dan Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki perbedaan dalam sistem pembatasan informasi internet, dimana Tiongkok memfokuskan pada penyensoran dan pembatasan terkait hal-hal yang bersifat sensitif bagi negara dan Korea Selatan lebih fokus kepada penghapusan atau *take down system* terhadap beberapa informasi yang dianggap tidak relevan atau mengancam negara. Penulis dalam hal ini membandingkannya dari sisi jenis konten yang diatur, metode penghapusan atau penyensoran, aturan mengenai berita-berita fitnah dalam dunia *cyber*, aturan mengenai registrasi nama asli, hingga efektifitas metode yang digunakan kedua negara. Namun disisi lainnya, regulasi seperti penggunaan nama asli juga diperlukan untuk mengurangi adanya kejahatan dalam media sosial seperti penipuan hingga pemalsuan data, penulis dalam hal ini menyatakan bahwa implementasi aturan tersebut hanyalah membentuk ketakutan semata tanpa menyadari lebih lanjut dampak yang diakibatkan apabila semua data yang digunakan di internet tidaklah murni milik pribadi. Pada bagian akhir, penulis menjelaskan bagaimana kedua negara ini melakukan pelanggaran terhadap

freedom of expression sebagai salah satu bentuk Hak Asasi Manusia, hal ini didasari oleh pasal-pasal yang berada di ICCPR.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wowor et al. (2024), disebutkan bahwa Tiongkok menggunakan Great Firewall of China (GFW) sebagai alat untuk mengamankan negaranya dari ancaman dunia maya, terutama dalam konteks ancaman politik. GFW dipandang sebagai satu dari banyak upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mengendalikan arus informasi yang masuk dan keluar negara, serta untuk memonitor dan menanggapi ancaman yang muncul dalam ruang siber.

Penelitian tersebut menyoroti bahwa kekuatan siber Tiongkok semakin berkembang sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan kemajuan yang diterapkan dalam bidang keamanan siber. Tiongkok telah memperkuat infrastruktur siber nasionalnya, meningkatkan kesiapan dan respons terhadap serangan siber, serta mengembangkan kemampuan teknis dan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber.

Fokus penelitian ini pada ancaman politik menunjukkan bahwa Tiongkok menganggap kontrol atas informasi dan komunikasi dalam ruang siber sebagai hal yang krusial untuk menjaga stabilitas politik dan kedaulatan negara. GFW dan upaya-upaya keamanan siber lainnya dipandang sebagai strategi yang diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap keamanan nasional yang mungkin timbul dari serangan siber yang dapat merusak stabilitas politik atau mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menjabarkan secara utuh mengenai dampak positif maupun negatif dari keberadaan *The Great Firewall* dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Penelitian ini kemudian menambahkan beberapa hal yang tidak dibahas didalam penelitian sebelumnya, tidak hanya dari sisi perekonomian saja, namun juga pengamanan terhadap budaya dan nilai-nilai sosial-komunis Tiongkok yang harus dilestarikan di era gempuran pengaruh barat melalui keberadaan *The Great Firewall*.

1.5.2 Kerangka Pemikiran

1.5.2.1 *The Clash of Civilization dalam The Great Firewall*

Poskolonial atau pasca-kolonial memiliki hubungan yang dekat dengan tindak penjajahan. Kolonial berasal dari kata *colonial* atau dalam bahasa latin *colonia* berarti tanah atau pemukiman. Oleh karena itu, kolonialisme dapat diartikan sebagai pemukiman warga di suatu tempat diluar wilayah asli, namun daerah tersebut masih dianggap sebagai wilayah mereka. Menurut Lo dan Helen (1997) teori poskolonial itu sendiri mencakup tiga perhatian yakni kebudayaan masyarakat yang pernah mengalami penjajahan Eropa, respon perlawanan terhadap penjajahan, dan marginalitas oleh kapitalisme.

Poskolonialisme menyoroti pentingnya perbedaan kebudayaan hingga agama dalam membentuk suatu interaksi dan konflik global, dimana dalam hal ini ditekankan akan perlunya pemahaman dan dialog untuk mencapai koeksistensi damai dan mencegah perselisihan lebih lanjut di dunia internasional. Tujuan pengembangan dari teori poskolonialisme ini ialah untuk

melawan sisa kolonialisme bagi pengetahuan salah satunya pada sisi kultur. Hal ini dikarenakan kolonialisme mengarahkan adanya dominasi dari setiap individu dan mendorong kekacauan tatanan dunia (Diannita, 2021).

Asumsi teori ini menyatakan bahwa cara kolonialisasi pada zaman ini lebih diperhalus, kedua postcolonial memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam menciptakan kebenaran berdasarkan mode yang berbeda makna dan dalam bentuk pengetahuan yang melahirkan keadilan, perdamaian, dan pluralisme politik. Postkolonial menyatakan bahwa masih terdapat warisan dari intelektual terdahulu dalam pengaturan, pengetahuan, hingga pembuatan kebijakan, dimana hal tersebut seharusnya bersifat netral dan universal. Teori postkolonial menganggap bahwa teori hubungan internasional sebelumnya terlalu bersifat *western-centric*, sehingga teori ini melihat isu-isu hubungan internasional dari kacamata timur (Grovoqui, 2007).

Kemudian, penulis akan menguraikan fenomena *The Great Firewall* sebagai salah satu sikap Tiongkok untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya berupa nilai dan budaya melalui *The Clash of Civilization* oleh Samuel P. Huntington sebagai bentuk Postkolonialisme. Dalam teori ini, akan lebih diperdalam mengenai kepentingan nasional berupa peradaban budaya merupakan salah satu sumber fundamental munculnya konflik dalam dunia internasional pasca terjadinya perang dingin.

Selain nilai ideologi hingga ekonomi, konflik antar negara super power juga dapat terjadi dikarenakan kebudayaan. Masa perang dingin merupakan

masa dimana negara mendefinisikan dirinya melalui identitas masing-masing berdasarkan ideologi yang dianut (komunisme maupun demokrasi liberal). Budaya disisi lainnya akan memilah masyarakat dunia hingga menjadi asal muasal konflik yang dominan.

Menurut Huntington (1996), peradaban ialah suatu entitas budaya yang merupakan pengelompokan terhadap orang-orang dengan tingkat identitas budaya yang luas sehingga membedakannya dengan spesies lain. Hal ini dibatasi oleh beberapa unsur objektif seperti sejarah, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Begitu juga unsur subjektif yang merupakan identifikasi diri terhadap orang-orang tersebut.

Kemudian Huntington (1996) membagi peradaban dunia menjadi 9 bagian, yakni peradaban *Western* (Barat) meliputi Eropa hingga Amerika Utara, *Orthodox*, Amerika Latin, *Islamic*, Hindu, Buddhist, *Japanese* (Jepang), *Sinic* (Tiongkok), dan *African*. Dalam penelitian ini nantinya akan difokuskan kepada peradaban budaya Amerika Utara yakni negara Amerika Serikat dengan peradaban budaya sinic yaitu Tiongkok.

Selanjutnya, Huntington (1996) menjelaskan bahwa terdapat setidaknya enam alasan mengapa dapat terjadi benturan terhadap peradaban-peradaban yang disebutkan sebelumnya yaitu peradaban merupakan hal yang mendasar dan nyata. Peradaban dapat dibedakan melalui bahasa, budaya, agama, sejarah, dan tradisi. Perbedaan peradaban tersebut tidak selalu menimbulkan konflik,

namun perbedaan peradaban juga telah memunculkan beberapa konflik dengan kekerasan dan berkelanjutan.

Kedua, semakin mengecilnya dunia menyebabkan interaksi antar peradaban meningkat dan memunculkan adanya kesadaran peradaban dan rasa berhati-hati terhadap perbedaan. Ketiga, perubahan sosial dan modernisasi ekonomi yang memisahkan orang-orang dari identitas lokalnya. Keempat, pertumbuhan terhadap kesadaran peradaban. Hal tersebut ditunjang dengan peran ganda barat. Kelima, karakteristik budaya yang lebih rumit untuk berubah hingga dipecahkan dibandingkan politik dan ekonomi. Terakhir, peningkatan regionalisme yang berhasil meningkatkan kesadaran peradaban (Huntington, 1996).

1.5.2.2 Keamanan Siber pada *The Great Firewall*

Keamanan siber merupakan salah satu bagian dari keamanan informasi yang mengamankan sistem yang terhubung ke internet, termasuk perangkat keras dan lunak, program, dan segala data dari ancaman siber. Keamanan siber mengacu pada teknologi, proses, dan praktik yang dirancang agar dapat melindungi jaringan, program, data dari serangan, kerusakan, dan sebagainya.

Peran keamanan siber sangatlah penting dikarenakan semua organisasi pemerintah, perusahaan swasta, militer melakukan semua pengumpulan, pengelolaan, pemrosesan data melalui komputer dan internet yang terhubung dengan jaringan. Data tersebut bisa saja berupa data dengan informasi sensitif, sehingga dapat memunculkan adanya dampak negatif apabila secara tidak

sengaja disebarluaskan. Keamanan informasi merupakan proses untuk melindungi informasi dan data sensitif dari segala akses tidak sah dalam bentuk elektronik maupun cetak (Arifin, 2019).

Keamanan siber merupakan aktivitas pencegahan dan pengamanan terhadap sumber daya telematika untuk mengurangi tindakan kriminalitas pada dunia siber. Terdapat tujuh elemen-elemen dalam keamanan siber yakni:

1. *Security Policy Document*
2. *Perimeter Defense*
3. *Information Infrastructure*
4. *System Information and Event Management*
5. *Network Monitoring System*
6. *Human Resource and Security Awareness*
7. *Network Security Assessment*

Keamanan yang diperkuat dalam sisi jaringan, penutupan port, sistem komputer yang rentan terhadap serangan atau dari firewall. Jika melihat dari sisi sumber daya manusia, praktisi yang bekerja dalam bidang keamanan siber dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu analisis keamanan, peretas, dan spesialis forensik (Rahmawati, 2019).

Dalam mengurangi dampak dari adanya resiko ancaman dalam keamanan siber dan informasi, perlu dilakukan beberapa tindakan secara efektif demi mengamankan kepentingan negara seperti menyediakan sistem kontrol terhadap akses dan otoritas sistem, menumbuhkan budaya sadar akan adanya ancaman melalui edukasi, melakukan pemeliharaan sistem secara berkala,

menyediakan sistem *backup*, melakukan manajemen konfigurasi dan pencatatan untuk segala perubahan sistem, dan sebagainya (Arifin, 2019).

Mencapai suatu keamanan dalam bidang siber dapat dicapai dengan adanya kebijakan dan infrastruktur dari suatu negara, hal ini mencakup upaya legislative, intervensi pemerintah, dan inisiatif dalam pengembangan kapasitas teknologi maupun siber (You, 2022). Kebijakan siber memainkan peran penting dalam memperkuat suatu ketahanan dalam sistem infrastruktur negara. Dukungan pemerintah didukung dengan adanya intervensi kebijakan yang tepat, memiliki peran penting untuk meningkatkan keamanan siber suatu negara (Ani, 2022). Pemerintah juga perlu memiliki inisiatif untuk mengembangkan kapasitas secara terkoordinasi dan koheren untuk keamanan siber dengan fokus untuk meningkatkan adanya pengetahuan dan Pendidikan bagi kapasitas siber suatu negara (Calderaro, 2020).

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Keamanan Siber

Keamanan siber menurut Alghamdi (2018) dimaksudkan untuk menjelaskan suatu kumpulan alat, kebijakan, pedoman, pendekatan untuk manajemen risiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi segala ketersediaan, integritas dan kerahasiaan aset yang terhubung pada infrastruktur pemerintah, swasta, dan

warga negara. Aset disini termasuk aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi, dan data dalam lingkup siber (Alghamdi, 2018).

Menurut Ghernaouti-Helie (2009) konsep keamanan siber memiliki kaitan erat dengan perlindungan pada sumber daya teknologi informasi bagi segala objek material maupun immaterial terhadap segala jenis potensi yang berbahaya. Ancaman atau bahaya dapat diartikan sebagai kemungkinan adanya suatu peristiwa (kesalahan, bencana, serangan eksternal atau internal, dan sebagainya) yang merugikan hingga menghancurkan sumber daya teknologi informasi. Keamanan siber adalah suatu cara yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan suatu informasi. Oleh karena itu, keamanan suatu negara dapat bergantung pada kinerja yang baik dari infrastruktur keamanan siber sebagai sarana pendukung (Hélie, 2009).

Keamanan siber memiliki peran yang penting dalam melindungi kepentingan suatu negara, termasuk nilai-nilai dan kebudayaan. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan informasi hingga stabilitas sosial dan budaya yang terintegrasi dalam dunia digital (Kharmalov, 2019). Keamanan siber merupakan alat vital untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai dan kebudayaan suatu negara. Dengan melindungi informasi budaya, menjaga stabilitas sosial, membangun budaya keamanan siber, dan mengembangkan strategi keamanan nasional yang adaptif, negara dapat mempertahankan integritas dan keberlanjutan nilai-nilai budaya di era digital.

1.6.1.2 Imperealisme Budaya

Budaya berdasarkan pemaparan dari Edward Burnett Tylor (1832-1972), kebudayaan merupakan suatu sistem yang kompleks dan mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, adat istiadat, hukum, dan sebagainya. Kebudayaan juga mencakup kebiasaan yang biasa dilakukan oleh anggota masyarakat dalam budaya tersebut. Kemudian, Clifford Geertz (1926-2006) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem aturan yang mencakup makna dan simbol, simbol diartikan dan diinterpretasikan supaya mengatur perilaku, sumber ekstrasomatik informasi, mengembangkan pengetahuan, cara bersikap, dan sebagainya (Syakhrani, 2022).

Dalam kebudayaan itu sendiri terdapat imperialisme budaya, hal ini merupakan suatu istilah yang memiliki muatan ideologi berkaitan dengan penggambaran media barat terhadap khalayak luar negeri. Menurut Ces Hamelink (1983) hilangnya suatu identitas lokal yang mencakup adanya adat, pakaian, music, gaya hidup, dan sebagainya diakibatkan oleh segala sesuatu yang mengacu pada Amerika Serikat.

Imperialisme budaya dibagi menjadi dua model, pertama ialah model Schiller yang lebih mengedepankan sifat-sifat ideologis dan yang kedua adalah model yang bisa dianggap lebih umum atau generic. Masing-masing kelompok dalam imperialisme budaya ini membangun tradisi riset dengan jalan yang berbeda-beda. Dimana model pertama dibangun berdasarkan kelompok pendekatan ekonomi dan politik oleh tradisi neo marxis. Sedangkan untuk

kelompok yang kedua, datang dari adanya ilmuwan behavioristik yang memberikan penjelasan program riset komunikasi terhadap penekanan pada efek media, berita, dan analisis (Malik, 2014).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Keamanan Siber

Dalam menganalisis adanya ancaman bagi keamanan siber di Tiongkok, kita dapat melihatnya melalui kerangka dari Baldwin mengenai keamanan itu sendiri. Pertama adalah *security for whom?* Dimana dalam hal ini dijelaskan terkait objek yang membutuhkan adanya pengamanan terhadap ancaman yang dirasakannya. Keamanan tersebut dapat diberikan bagi suatu negara maupun individual. Dalam hal ini, objek dari keamanan ialah Tiongkok, dimana Tiongkok membutuhkan keamanan untuk nilai dan kebudayaan negaranya dari pengaruh Barat (Baldwin, 1997).

Selanjutnya, Baldwin menjelaskan adanya *security for which values?* Disini Baldwin menjelaskan bahwa suatu negara, individual, maupun aktor sosial lainnya pasti memiliki nilai masing-masing. Nilai ini mencakup adanya keamanan fisik, ekonomi, psikologis, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dengan Tiongkok yang memiliki nilai konfusianisme yang menekankan pada keharmonisan masyarakat, dimana nilai tersebut merupakan warisan tradisional dari seorang pemikir Tiongkok yakni Konfusius. Pengamanan nilai tersebut kemudian diimplementasikan pada pembentukan kebijakan Tiongkok yang akan dipaparkan pada bagian analisis penelitian.

Terakhir, Baldwin menjelaskan juga mengenai *how much security?* yakni seberapa banyak keamanan yang dibutuhkan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Dalam hal ini, kita bisa melihat bagaimana Tiongkok mendapatkan keamanan tersebut melalui pembentukan sistem sensor berupa *The Great Firewall*, pengamanan tersebut bertujuan untuk membendung adanya pengaruh imperialisme budaya dan nilai dari barat melalui media internet bagi masyarakat Tiongkok (Baldwin, 1997).

1.6.2.2 Imperialisme Budaya

Imperialisme budaya menyatakan bahwa negara barat telah memproduksi kebanyakan media seperti film, komik, berita, dan sebagainya dikarenakan adanya sumber daya yang mencukupi untuk menerbitkan beberapa hal tersebut, sumber daya tersebut merupakan dana yang cukup. Negara yang dianggap tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam memproses film, komik, maupun berita tersebut kemudian membeli konten dari Barat dikarenakan lebih murah dibandingkan dengan produksi secara langsung.

Hal ini jika dilangsungkan akan memunculkan adanya pengaruh besar terhadap negara yang membeli konten dari Barat tersebut, dimana pengaruh barat dapat menyebar dan merubah bagaimana kehidupan pada negara dunia ketiga atau negara yang pernah menghadapi adanya kolonialisasi. Konten melalui film, berita, dan komik tersebut mempengaruhi bagaimana masyarakat kemudian berfikir, mempercayai, dan menjalani kehidupan sehari-harinya (Schiller, 1991).

Imperialisme budaya itu sendiri dapat mengacu pada penyebaran yang secara tidak langsung dapat mengarah ke penjajahan hingga penguasaan secara implisit terhadap kebudayaan suatu negara. Hal ini tentu saja dapat menjadi bahaya akan adanya kelunturan dari kebudayaan suatu negara, kelunturan tersebut akan memunculkan masyarakat yang semakin tidak peduli dan menjadikan kebudayaan dari negara lain sebagai acuan untuk kesehariannya (Melisa, 2023).

Dalam kasus Tiongkok, Imperialisme budaya itu sendiri dapat kita lihat dengan adanya penyebaran konten media, film, berita dari Barat. Hal ini pun kemudian menjadi suatu ancaman bagi nilai dan kebudayaan Tiongkok. Dalam menanggapi hal tersebut, *The Great Firewall* bertujuan untuk meminimalisir adanya pengaruh barat berlebih dan mencegah adanya kelunturan budaya Tiongkok.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa, tindakan pemerintah Tiongkok dalam mengesahkan kebijakan *The Great Firewall of Tiongkok* banyak memunculkan kecaman dari dunia internasional. Namun, diluar banyaknya artikel maupun pendapat negatif masyarakat internasional, tindakan pemerintah Tiongkok dalam mengesahkan *The Great Firewall* merupakan salah satu bentuk pengamanan terhadap negaranya. Sehingga pemerintah Tiongkok dalam hal ini, menggunakan *The Great Firewall* sebagai salah satu bentuk pengamanan

negara terutama dalam bidang kebudayaan, nilai, hingga perekonomian dari pengaruh Amerika Serikat.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Lexy J Moleong (2005:6), metode ini merupakan cara untuk mengetahui persepsi, motivasi, tingkah laku dalam suatu fenomena secara keseluruhan. Sehingga, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana tingkah laku pemerintah Tiongkok dalam menerapkan keberadaan *The Great Firewall* hingga persepsi masyarakat dalam menanggapi hal ini. Sifat dari metode kualitatif itu sendiri ialah induktif, dimana dalam hal ini penulis akan mencari, menganalisis, kemudian melaporkan hasil dari penemuan tentang objek yang sedang diteliti.

1.8.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, akan digunakan tipe deskriptif yakni tipe untuk mengetahui gambaran objek penelitian secara faktual dan tidak ada perbandingan dengan variabel lainnya. Dalam hal ini, akan dijelaskan secara tersurat mengenai sistem *The Great Firewall* Tiongkok serta tindakan pemerintah Tiongkok akan hal tersebut. Hingga bagaimana nantinya hal ini dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Tiongkok di era globalisasi ini.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil fokus pada fenomena yang terjadi di Tiongkok.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini ialah masyarakat Tiongkok yang secara aktif menggunakan internet serta sosial media yang ada didalamnya.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif beberapa jurnal internasional dan nasional, beberapa kata-kata tertulis oleh masyarakat Tiongkok tentang keberadaan *The Great Firewall*, dan berita-berita dari situs internasional maupun domestik.

1.8.5 Sumber Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui sumber sekunder, dimana data tidak diperoleh secara langsung oleh sumber yang terlibat, namun data akan dikumpulkan melalui artikel, berita, dan jurnal terkait di internet.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu melalui studi Pustaka, dimana akan dikumpulkan beberapa bahan literatur seperti jurnal, buku, artikel, dan sebagainya mengenai isu terkait. Teknik ini dilakukan untuk menunjang data serta kredibilitas dari penelitian.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data kongruen, metode ini menjelaskan suatu peristiwa melalui perumusan suatu teori dalam mengetahui hasil akhir kasus yang sedang diteliti. Penulis akan mencari penyesuaian dari isu yang dibahas dalam penelitian dengan pertanyaan

penelitian, data yang dipaparkan, hingga metode yang digunakan. Metode ini digunakan untuk meneliti kecocokan teori serta operasionalisasi konsep dengan data yang ada.

1.8.8 Kualitas Penulisan

Kualitas data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat akurat dan valid, dimana sumber yang digunakan oleh penulis akan dipastikan merupakan sumber-sumber yang dapat dipercaya merupakan hasil data secara asli tanpa adanya manipulasi. Penulis menggunakan beberapa sumber seperti jurnal, buku, dan artikel terkait *The Great Firewall* hingga tanggapan masyarakat maupun pemerintahan terhadap pengaruh Amerika Serikat terhadap kebudayaan, nilai, hingga perekonomian Tiongkok.